

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Pasal 9 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Menteri sebagai pengguna anggaran/barang Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara yang dipimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dibantu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melalui Sekretaris Jenderal. Untuk memperlancar operasionalnya memerlukan persediaan yang dicatat dalam neraca.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang. Menurut *PMK 219/PMK.05.2013* bahwa persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Nilai atas perolehan persediaan tersebut harus didukung dengan dokumen sumber yang dapat diverifikasi kevalidannya, seperti faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima (BAST), atau SPP/SPM/SP2D.

Penatausahaan persediaan dilakukan melalui pengoperasian aplikasi persediaan versi terbaru. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan yaitu perolehan dan pemakaian. Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran persediaan pada satker Pusdatin menggunakan metode perpetual dengan system Harga Perolehan Terakhir (HTR).

Inventarisasi fisik (*stock opname*) sangat dibutuhkan untuk mengatur keluar masuknya barang persediaan agar tidak terjadi penumpukan atau kekurangan barang. Pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, *stock opname* dilakukan per-minggu, per-bulan, dan per-tiga bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang "Perlakuan Akuntansi atas Persediaan pada Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari topik laporan akhir ini adalah :

1. Bagaimana klasifikasi atas persediaan pada satker Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran persediaan pada satker Pusat Data dan Informasi?
3. Bagaimana proses penerapan akuntansi persediaan di satker Pusat Data dan Informasi?
4. Bagaimana proses pencatatan persediaan melalui aplikasi yang digunakan pada satker Pusat Data dan Informasi?

1.3 Tujuan

Pada praktik kerja lapangan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan ini, akan dipaparkan kajian tugas akhir yang bertujuan untuk:

1. Menguraikan klasifikasi akuntansi persediaan pada satker Pusat Data dan Informasi.
2. Menguraikan pengakuan dan pengukuran persediaan pada satker Pusat Data dan Informasi.
3. Menguraikan proses penerapan akuntansi persediaan di satker Pusat Data dan Informasi.
4. Menguraikan proses pencatatan persediaan melalui aplikasi persediaan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.

1.4 Manfaat

Hasil laporan akhir diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan. Disamping itu tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber informasi yang terkandung didalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan bagi instansi dalam menguraikan tinjauan akuntansi atas persediaan.

b. Bagi Penulis

Tugas akhir ini memberikan ilmu dan wawasan baru mengenai klasifikasi persediaan, proses pencatatan persediaan, penerapan persediaan, serta pencatatan persediaan melalui aplikasi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah

Menurut Hans Kartikahadi *et al.* (2016:3) akuntansi ialah sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim 2007).



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2.2 Definisi Persediaan

Menurut PSAP 5 persediaan adalah barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persediaan di entitas pemerintahan mencakup:

1. Barang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan (supplies), misalnya barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), bahan pembersih, dan barang tak habis pakai, seperti lampu, gunting, dll.
2. Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh: ATK, Komputer *supplies*/tinta.
3. Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis.

2.3 Pengakuan Persediaan